

BAB VI

PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

Implementasi kerja sama internasional antara Kemenparekraf dengan WIPO pada periode tahun 2022–2024 menunjukkan adanya kontribusi signifikan dan relevan dalam mendorong pencapaian SDGs 9, khususnya melalui pengembangan subsektor kriya berbasis KI. Sebagai subsektor yang bersifat padat karya dan berkaitan dengan warisan budaya, kriya menghadapi tantangan dalam berinovasi dan mengakses pasar global. Dengan demikian, kerja sama ini menghadirkan berbagai dukungan bagi ekosistem, agar para pelaku kreatif lebih kondusif dalam mengintegrasikan pendekatan berbasis KI, guna memperkuat kapasitas inovasi, industrialisasi, serta infrastruktur pendukung melalui perlindungan dan pemanfaatan KI, yang merupakan ketiga pilar utama SDGs 9.

Bukti konkret perwujudan langkah kerja sama ini tercermin dalam beberapa inisiatif dan program bersama seperti “IP Branding Project Bali,” peluncuran merek kolektif “UnBalivable,” pelatihan berbasis perlindungan dan pemanfaatan KI, hingga pelibatan Indonesia—yang diwakili oleh Menparekraf Sandiaga Uno—dalam promosi potensi KI industri kreatif Indonesia melalui berbagai pertemuan bilateral dan forum multilateral WIPO. Salah satu tantangan utama yang dihadapi kerja sama ini adalah literasi KI. Untuk menjawab hal tersebut, kerja sama ini memperlihatkan upaya untuk memperluas wawasan terkait pentingnya perlindungan dan pemanfaatan KI bagi pelaku kriya, diwujudkan melalui edukasi publik dengan metode sosialisasi, FGD, media sosial, dan pameran. Berbagai langkah tersebut merupakan cerminan mengenai bagaimana implementasi KI sebagai strategi penguatan produk kriya lokal di ranah global, menjadikannya lebih bernilai dan berdaya saing. Hal tersebut pun tidak lepas dari adanya penguatan ekosistem industri itu sendiri, yang menumbuhkan rasa kondusif dan inovatif dalam berkarya kreatif.

Kerja sama ini tidak hanya menghasilkan berbagai inisiatif dan program substantif, seperti pelatihan, penguatan merek kolektif, peningkatan literasi KI melalui edukasi publik dan pameran, tetapi juga berperan strategis dalam

diplomasi ekonomi kreatif di tingkat global. Sebagai mitra internasional, WIPO sendiri memberikan dukungan berupa asistensi teknis, sekaligus mendorong integrasi sistem perlindungan dan pemanfaatan KI bagi pembangunan sektor ekonomi kreatif berkelanjutan di Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa kerja sama Kemenparekraf dan WIPO terbukti sebagai langkah awal yang mampu memperkuat aspek inovasi dan industrialisasi subsektor kriya melalui infrastruktur berbasis KI, sejalan dengan ketiga pilar utama SDGs 9, terutama mengingat inisiatif dan program bersama yang dihasilkan pun relevan dengan target-target di dalamnya.

Dari perspektif teori, implementasi kerja sama ini mencerminkan prinsip kemitraan *multi-stakeholder*. Sebagaimana dikemukakan oleh Wangke (2020), keterlibatan aktor negara dan non-negara secara setara dan konsultatif, disertai partisipasi yang sudah cukup beragam dan menunjukkan antusiasme tinggi. Pendekatan ini mampu menjawab keterbatasan satu aktor dalam mendorong transformasi subsektor kriya, dengan membangun tata kelola berbasis *soft power* yang inklusif. Sebagai output, kriya mencatat pertumbuhan nilai ekspor pasca pandemi, disertai dengan peningkatan kesadaran dalam membangun inisiatif dan program berbasis KI. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa kerja sama ini bukan sekadar inisiatif simbolik atau seremonial, tetapi merupakan bagian dari strategi pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan pembangunan industri kreatif—termasuk kriya—yang tangguh, inovatif, dan berkelanjutan melalui pencapaian SDGs 9.

VI.2. Saran

VI.2.1. Saran Praktis

Secara praktis, penting bagi para pemangku kepentingan untuk merancang langkah berikutnya yang konkret dan berkelanjutan pasca pelaksanaan *pilot* program, agar implementasi MoU tidak bersifat simbolis semata. Selain itu, juga diperlukan integrasi peningkatan literasi KI yang kontekstual, aplikatif, serta inklusif, ke dalam bagian strategi kerja sama ke depan.

VI.2.2. Saran Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki kelebihan dalam mengaitkan model kemitraan *multi-stakeholder* dengan agenda pembangunan berkelanjutan dalam sektor ekonomi kreatif. Akan tetapi, keterbatasan pada periode fokus penelitian (2022–2024), serta akses terhadap isi dokumen MoU dan data mengenai evaluasi program menjadi kelemahan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali lebih jauh terkait aspek keberlanjutan inisiatif dan program bersama, keterlibatan setiap aktor, dan dampak konkret. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik di bidang hubungan internasional, sektor ekonomi kreatif, subsektor kriya, dan pembangunan berkelanjutan.